

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. KHAIDIR LUTFI**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. BURHANUDIN**

Jabatan : **Bupati Belitung Timur**

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja perubahan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja perubahan jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perubahan tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Drs. BURHANUDIN

Manggar, 16 November 2023

Pihak Pertama



Ir. KHAIDIR LUTFI

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19640831 199303 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	B $\geq$ 76,61 – 88,30 (85,33)
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70 – 80 (71,72)
		3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	91,70 Persen
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	4	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Tinggi (81,50)
		5	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	84,55 persen
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	6	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen
		7	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	85,71 persen
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	8	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	64,84 persen
		9	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen
		10	Investor Baru yang Berinvestasi	37 investor
		11	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	59 investor

PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.216.401.236	Rp. 6.012.838.400	APBDP II
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 32.282.400	Rp. 32.282.400	APBDP II
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 132.176.300	Rp. 132.176.300	APBDP II
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 203.940.500	Rp. 243.020.000	APBDP II
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 546.437.000	Rp. 553.036.500	APBDP II
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 46.361.000	Rp. 51.121.000	APBDP II

 Pihak Kedua
Drs. BURHANUDIN

Manggar, Oktober 2023
Pihak Pertama

Ir. KHAIDIR LUTFI
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19640831 1990303 1 004